

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdiri atas beberapa wilayah provinsi. Dalam setiap wilayah provinsi terdiri dari beberapa wilayah kabupaten atau kota, dan dalam setiap kabupaten atau kota terdiri dari desa atau kelurahan.

Desa, penduduk, sistem sosial serta pemerintahannya merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Dalam sejarahnya desa telah mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang sangat panjang. Desa yang pada permulaannya telah mampu mengembangkan diri dengan kelembagaan yang lengkap di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri mulai kehilangan otonominya ketika muncul otoritas yang lebih besar di luar dirinya. Pada masa munculnya kerajaan-kerajaan Nusantara, desa hanya diminta mengakui otoritas tersebut dengan tetap menjalankan otonomi sepenuhnya. Akan tetapi, ketika penguasa lalu memperluas pengaruhnya dengan memperluas cakupan geografisnya maka desa-desa yang masuk dalam lingkaran inti kekuasaan (*negaragung*) dipaksa untuk mau mengubah diri menjadi bagian langsung dari kerajaan. Inilah permulaan

intervensi kekuatan luar terhadap desa. Pada masa penjajahan asing, desa dijadikan obyek eksploitasi ekonomi penguasa dan kaum kapitalis.

Gagasan untuk memajukan desa dengan cara rasionalisasi dan modernisasi dapat dilacak dari pemikiran Mohammad Yamin dan Soepomo yang dilontarkan dalam sidang-sidang BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan. Keduanya menggagas bahwa pemerintahan di alam Indonesia merdeka akan disusun dalam tiga tingkatan: 1) pemerintahan kaki yaitu desa; 2) pemerintahan tengah yaitu pemerintahan daerah; 3) pemerintahan atas sebagai pemerintah pusat. Gagasan ini mengandung maksud bahwa pemerintahan Indonesia merdeka harus berpijak pada kaki yang kokoh, yaitu desa yang merupakan bentukan bangsa Indonesia sendiri dengan susunan yang masih asli. Desa akan dimodernkan dan dirasionalkan dengan menariknya ke dalam sistem pemerintahan resmi, bukan tetap membiarkannya pada masa penjajahan.

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian politik lokal di tingkat desa tidak dapat dipisahkan dengan sistem demokrasi, karena pemerintahan di tingkat desa erat kaitannya dengan suasana yang demokratis. Pengaturan desa dengan segala kepentingan di dalamnya diatur sesuai dengan asal usul dan tradisi

desa, hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat pedesaan telah berkembang sistem demokrasi.

Dalam perkembangannya, proses demokrasi di desa menjadi lebih kompleks. Hal ini sejalan dengan proses sejarah yang telah menyertainya. Proses demokrasi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dengan sistem kekuasaan yang sedang berlaku. Sistem kekuasaan itu sendiri mengarah pada siapa yang tengah berkuasa pada saat itu. Sistem kekuasaan pada masa kerajaan berbeda dengan sistem kekuasaan pada masa penjajahan, berbeda pula dengan sistem kekuasaan pasca kemerdekaan. Adanya perubahan sistem politik sesuai dengan sistem kekuasaan pada negara akan mempengaruhi pula sistem kekuasaan di desa.

Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi walaupun ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata itulah timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Konsep saling mempengaruhi antara sosial dan politik termasuk unsur-unsur yang ada didalamnya merupakan suatu keniscayaan, pun

dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Dalam pengelompokan struktur masyarakat Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo berdasarkan agamanya, terdapat tiga agama yang dimana dua diantaranya menjadi mayoritas yaitu Islam dan Kristen Katolik. Hal ini menjadi menarik, karena tidak dapat dipungkiri kemajemukan ini akan berpengaruh terhadap kondisi sosial, budaya bahkan politik di desa tersebut. Seperti yang tersebut diatas, bahwa demokrasi pada suatu desa tidak dapat dipisahkan dengan sejarah desa tersebut, begitu pula desa Klepu, dimana agama Katolik yang sudah mulai masuk di Klepu sejak tahun 1968 telah membangun kemajemukan dalam beragama dan mempengaruhi dinamika sosial politiknya. Apalagi dengan latar belakang sejarah bahwa Kepala Desa Klepu mayoritas beragama Katolik, dan baru sekali pada pemilihan tahun 2012 yang terakhir ini calon kepala desa yang beragama Islam memenangkan pemilihan. Konsep kekuasaan tentang siapa yang berkuasa dan distribusi kekuasaan akan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial politiknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dipahami bahwa meski desa merupakan unit pemerintahan yang paling kecil, namun dinamika dalam berpolitik menarik untuk dipelajari, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang *“DINAMIKA SOSIAL POLITIK PEDESAAN (Studi Kasus Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2016)*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah didefinisikan diatas, maka fokus penelitian ini adalah: Bagaimana dinamika sosial politik di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2016?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Mengetahui dinamika sosial politik di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang berjudul “DINAMIKA SOSIAL POLITIK PEDESAAN (Studi Kasus DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO Tahun 2013-2016), memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah :

1. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang bersangkutan dan tentunya bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian yang sudah dilakukan ini dapat berguna untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam memahami konsep dinamika sosial politik di pedesaan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau dengan kata lain definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah – istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus bahasa agar tidak salah menafsirkan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain :

1. Dinamika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dinamika adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.

2. Sosial

Kata sosial sering diartikan dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Menurut Dr. Ir. Darsono Wisadirana MS (2004:1) Ilmu sosial adalah disiplin ilmu yang mempelajari manusia dalam hidup bermasyarakat beserta gejala atau fenomena sosialnya yang timbul dalam setiap kehidupan. Ilmu sosial terdiri dari berbagai cabang ilmu yang masing-masing meneliti individu, masyarakat dan kebudayaan dengan titik tolak dan pengkajian yang berbeda serta pada objek penelitian yang berbeda pula. Cabang ilmu sosial yang menelaah gejala masyarakat secara umum beserta gejala social yang timbul disebut Sosiologi.

3. Politik

Menurut Inu Kencana Syafie (1997:18) pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada galibnya adalah membicarakan negara. Karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara serta bentuk dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti *pressure group*, *interest group*, *elite politik*, *pendapat umum (public opinion)*, *peranan partai politik dan pemilihan umum*. Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “Polis” yang berarti “negara kota” dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan (Robert Dahl). Tetapi politik juga bias dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pemerintahan, konflik, dan pembagian atau kata-kata yang serumpun (Hoogerwerf).

4. Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

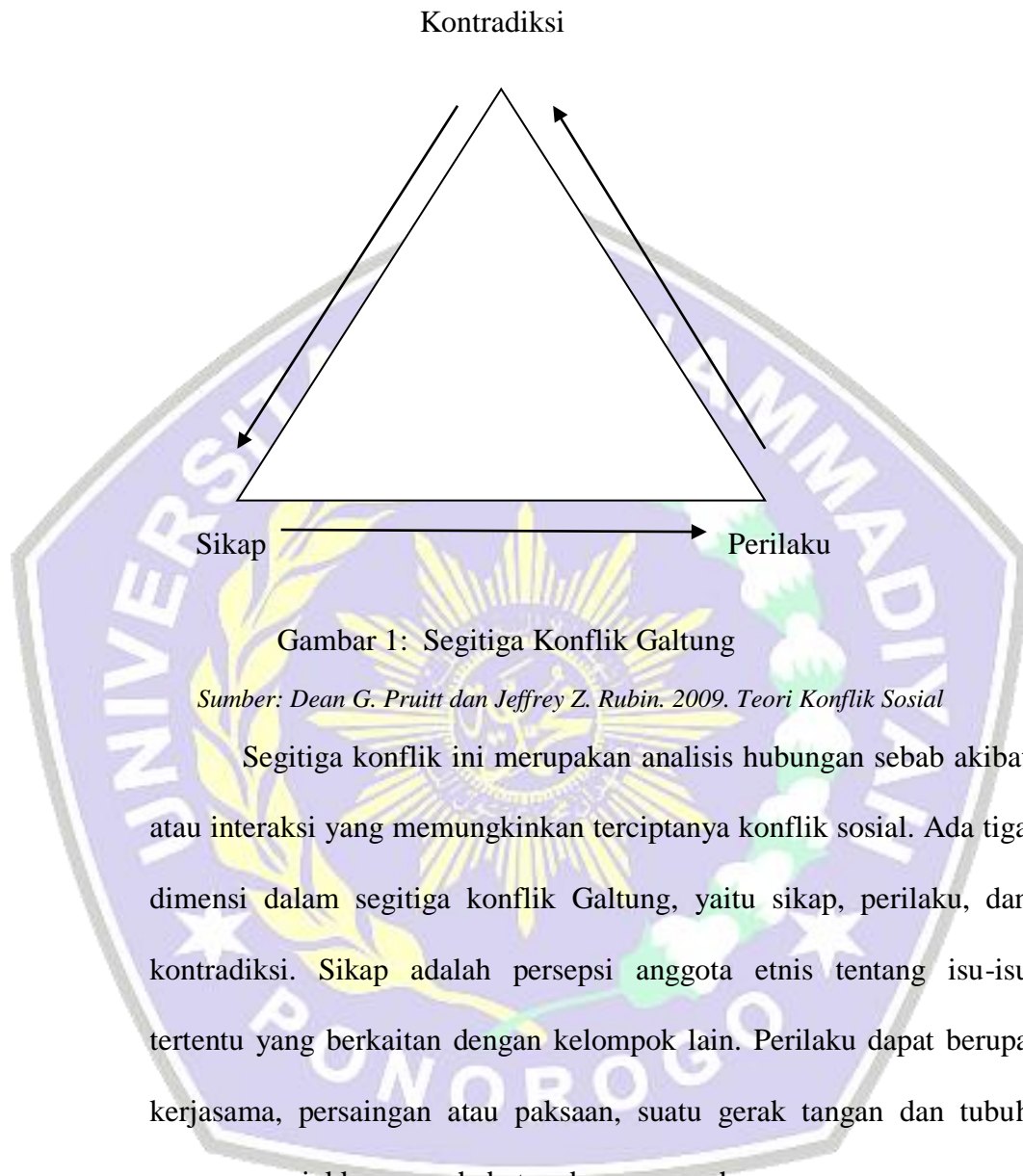
F. Landasan Teori

Untuk memecahkan permasalahan yang timbul diperlukan adanya jawaban atas penyebab dan akibat dari fenomena yang terjadi, jawaban tersebut dapat diperoleh dari suatu teori yang mendasari dari persoalan tersebut. Teori itu akan menjembatani antara konsep-konsep yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

1. Teori Konflik

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2009:9) konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Bagi Dahrendorf (dalam Novri Susan 2009:49) konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyebutnya sebagai "*integrated into a common frame of reference*". Lebih lanjut ia menyatakan bahwa unit analisis dalam sosiologi konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi sosial bias bersama sistem sosial. Ia memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan.

Segitiga konflik Galtung, memperlihatkan tentang analisis konflik multidisipliner.



Gambar 1: Segitiga Konflik Galtung

Sumber: Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*

Segitiga konflik ini merupakan analisis hubungan sebab akibat atau interaksi yang memungkinkan terciptanya konflik sosial. Ada tiga dimensi dalam segitiga konflik Galtung, yaitu sikap, perilaku, dan kontradiksi. Sikap adalah persepsi anggota etnis tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. Perilaku dapat berupa kerjasama, persaingan atau paksaan, suatu gerak tangan dan tubuh yang menunjukkan persahabatan dan permusuhan.

Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan problem sikap dan perilaku sebagai suatu proses, artinya kontradiksi diciptakan oleh unsur persepsi gerak etnis-etnis yang hidup dalam lingkungan sosial. Secara sederhana, sikap melahirkan perilaku, dan

pada gilirannya melahirkan kontradiksi dan situasi. Sebaliknya, situasi bisa melahirkan sikap dan perilaku. Misalnya persepsi etnis A terhadap B adalah negatif, maka muncul perilaku etnis A yang tidak kooperatif dengan etnis B, sehingga menimbulkan situasi yang kurang baik atau kontradiksi. Sebaliknya sikap etnis A akan dibalas dengan sikap dan perilaku etnis B dalam konteks antagonistik (melawan).

Sumber-sumber konflik menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2009:21) diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara suatu pihak dengan pihak lain, dimana kepentingan-kepentingan tersebut harus diterjemahkan ke dalam suatu aspirasi, yang di dalamnya terkandung berbagai tujuan dan standar. Konflik dapat terjadi karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif sulit di dapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Ada dua sumber utama kekakuan aspirasi, yaitu:

1. Nilai-nilai yang sangat penting mendasari aspirasi tersebut.

Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa aman, identitas, dan pengakuan oleh banyak orang atau bahkan mungkin oleh seluruh negara di dunia.

2. Tata nilai yang mendasari aspirasi adalah pilihan memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu (*either-or variety*), artinya

pilihan yang ada adalah antara mampu mendapatkannya atau tidak memperolehnya sama sekali. Nilai-nilai semacam itu menimbulkan aspirasi yang kaku karena setiap konsesi atau kelonggaran juga berarti mengorbankan seluruh nilai tersebut.

b. Aturan dan norma

Masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya secara konstan mengembangkan berbagai aturan untuk mengatur perilaku para anggotanya. Aturan yang lebih luas dan berlaku lebih lama disebut norma. Fungsi utama aturan-aturan tersebut adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi konflik. Norma relevan dengan konflik karena norma menetapkan hasil yang berhak diterima oleh seseorang sehingga juga menentukan aspirasi apa yang menjadi haknya. Hal tersebut menyiratkan bahwa, konflik biasanya terjadi ketika norma sosial dalam keadaan lemah atau sedang mengalami perubahan. Pada saat-saat semacam itu orang akan cenderung membentuk cara pandang yang bersifat *idiosyncratic* mengenai hak-haknya, cara pandang yang tidak cocok dengan cara pandangan yang dibentuk orang lain.

c. Terbentuknya kelompok pejuang (*Struggle Group*)

Ketika beberapa orang dengan kepentingan laten (tidak disadari) yang sama saling bercakap-cakap, maka kepentingan laten mereka sering kali muncul ke kesadaran. Setelah merasa yakin dengan pendirian masing-masing, mereka mungkin akan mengembangkan

aspirasi baru, yang dapat mengarah ke konflik dengan orang lain yang kepentingannya bertentangan dengan aspirasi tersebut. Konflik semacam itu terutama akan muncul bila mereka mulai mengidentifikasi diri sebagai kelompok yang terpisah dari kelompok lainnya. Aspirasi yang sama tersebut kemudian berubah menjadi norma kelompok, dan kepemilikan aspirasi tersebut menjadi manifestasi kesetiaan terhadap kelompok. Hasilnya dapat disebut sebagai sebuah *struggle group*. Ralf Dahrendorf (1986) menyebutkan tiga kondisi yang mendukung kemunculan sebuah *struggle group*, yang sering kali mendorong terjadi konflik, yaitu:

1. Komunikasi terus-menerus di antara orang-orang senasib.
2. Adanya seorang pemimpin yang membantu mengartikulasikan ideologi, mengorganisasikan kelompok, dan memformulasikan rencana untuk melakukan tindakan kelompok
3. Legitimasi kelompok di mata komunitas yang lebih luas atau setidaknya tidak ada tekanan komunitas yang efektif terhadap kelompok.

Beberapa teori mengenai kondisi-kondisi yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk memilih strategi dasar menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, yaitu :

a. *Contending*

Contending meliputi segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa mempedulikan

kepentingan pihak lain. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini tetap mempertahankan aspirasinya sendiri atau membujuk pihak lain untuk mengalah. Ada pelbagai taktik yang dapat digunakan oleh mereka yang memilih strategi ini. Termasuk diantaranya adalah mengeluarkan ancaman, menjatuhkan penalti dengan pengertian bahwa penalti itu tidak jadi dijatuhkan bila pihak lain mau mengalah, dan melakukan tindakan-tindakan yang mendahului pihak lain yang dimaksudkan untuk mengatasi konflik tanpa sepengetahuannya. Bila kedua belah pihak berusaha melakukan negosiasi untuk mengatasi kontroversi yang terjadi, maka *contending* juga melibatkan argumentasi persuasif, mengeluarkan tuntutan jauh melampaui batas yang dapat diterima, menempatkan diri dalam posisi “tidak dapat berubah”, atau menetapkan tenggat waktu.

b. *Problem Solving*

Problem solving meliputi usaha mengidentifikasi masalah yang memisahkan kedua belah pihak dan mengembangkan serta mengarah pada sebuah solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini berusaha mempertahankan aspirasinya sendiri tetapi sekaligus berusaha mendapatkan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan aspirasi pihak lain. Kesepakatan yang diperoleh di dalam *problem solving* dapat berbentuk kompromi (alternative nyata yang berada diantara

posisi-posisi yang lebih disukai oleh masing-masing pihak), atau dapat juga berbentuk sebuah solusi integratif (rekonsiliasi kreatif atas kepentingan-kepentingan mendasar masing-masing pihak).

c. *Yielding*

Yielding berarti dimana orang harus menurunkan aspirasinya sendiri, tidak perlu berarti penyerahan total, strategi ini juga bisa berarti konsensi parsial.

d. *Inaction*

Inaction adalah strategi melibatkan penghentian usaha untuk mengatasi kontroversi yang bersifat temporer dan tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi.

e. *Withdrawing*

Withdrawing hampir sama dengan *inaction* melibatkan usaha untuk mengatasi kontroversi yang bersifat permanen. Dapat pula diartikan dengan menarik diri.

Menurut Lewis Coser (dalam Novri Susan 2009:53) konflik tidak hanya berwajah negatif. Konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya. Ia melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian, dapat memberi peran positif atau fungsi positif dalam masyarakat.

2. Teori Partisipasi Politik

Ilmu politik, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “*polis*” dan bahasa Inggris “*politics*”. Menurut Djahiri (Dalam Komarudin Sahid 2011) kedua kata tersebut pada hakikatnya merujuk pada arti yang sama yakni kebijaksanaan. Dalam konteks ini dapat pula diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai “*en dam onia*” atau the “*good life*”, kehidupan yang baik. Tetapi kajian tentang politik dalam perkembangannya tidak hanya sebatas pada penelusuran secara istilah dan makna harfiahnya saja. Kajian tentang politik sangatlah luas. Batasan mengenai apa itu politik juga beragam. Beragamnya batasan ini sangat tergantung pada sudut pandang para pembuat batasan itu masing-masing.

Miriam Boediharjo (2008) mengemukakan, bahwa konsep-konsep pokok mengenai politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy belied*), dan pembagian (*distribution*), atau alokasi (*allocation*). Secara terurai, Miriam Boediharjo menjelaskan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan tujuan dari sistem itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang

menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Dan untuk melaksanakan kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. Artinya, suatu negara baru bisa disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Masalah partisipasi politik bukan hanya menyangkut watak atau sifat dari pemerintahan negara, melainkan lebih berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat suatu negara dan pengaruh yang ditimbulkan.

Menurut Komarudin Sahid (2011:176) partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *pars*, yang artinya bagian dan *capere* (*sipasi*) yang artinya mengambil. Bila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara.

Menurut Gabriel Almond (Dalam Komarudin Sahid 2011), partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Akan tetapi menurutnya, partisipasi politik selalu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator militer. Peran mereka sebagai agregator politik (penggalang atau penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya. Menurut Almond, negara besar memiliki bangunan organisasi yang telah terspesialisasi dalam menyalurkan bentuk agregasi politik berikut kebijakan terkait menghasilkan partai politik. Oleh karena itu menurutnya, partisipasi politik terbagi kedalam tiga kategori, seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 2 : Partisipasi menurut Almond

Sumber: Komarudin Sahid. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*

Selain dilihat dari sudut pandang derajat partisipasi politik, Gabriel Almond (Dalam Komarudin Sahid 2011) membagi bentuk partisipasi politik berdasarkan kelompok-kelompok berikut.

- a. Kelompok kepentingan, mereka dapat duduk dalam badan pengawas pemerintahan (*ombudsman*), misalnya dalam masalah pelayanan publik.
- b. Kelompok anomik, mereka adalah kelompok yang terbentuk secara spontan karena rasa frustrasi, putus asa, kecewa, dan emosi lain. Mereka turun ke jalan karena rasa ketidakadilan. Pada saat seperti ini sangat memungkinkan kekerasan akan terjadi "*lead to violence*" karena kelompok yang ada dan terorganisir semisal partai politik tidak mampu mewakili kepentingan mereka yang marah dalam sistem politik. Kekerasan dapat meledak pada saat tidak terduga dan tidak terkendali, walaupun kelompok anomik ada pula yang secara sengaja di organisir untuk kepentingan politik tertentu.
- c. Kelompok non-asosiasional, sangat jarang sekali terorganisir disebabkan aktivitas mereka yang sangat episodik pula. Perbedaan dengan kelompok anomik adalah dasar mereka membentuk kelompok karena kesamaan kepentingan etnik, wilayah, agama, pekerjaan, dan juga tali kekeluargaan. Kelompok ini bisa berkelanjutan bila dibandingkan dengan kelompok anomik. Kelompok anomik terbagi dua (1). Kelompok besar, erorganisasi (2). Sub-kelompok kecil pedesaan, mengenal satu sama lain sehingga lebih efektif.

- d. Kelompok institusional, merupakan bentuk kelompok yang lebih canggih karena sudah berupa partai politik, korporat bisnis, legislatif, militer, birokrasi, persekutuan gereja, majelis ulama, dimana mereka mendukung kelompok khusus dan memiliki anggota dengan tanggung jawab khusus untuk mewakili kepentingan kelompok.
- e. Kelompok asosiasional, merupakan kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, termasuk serikat perdagangan atau serikat pengusaha.
- f. Kecenderungan sekarang ini timbul kelompok besar keenam, yaitu *civil society*, dimana kelompok masyarakat terjun berinteraksi secara sosial dan politik tanpa campur tangan, atau control dari pemerintah berupa aturan. Mereka merupakan asosiasi bersifat sukarela.

Selain itu, bila dilihat sebagai suatu kegiatan partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, membayar pajak dan ikut dalam proses pemilihan pimpinan pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan menaati peraturan atau pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

(Sastroadmojo:1995)

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba (dalam Komarrudin Sahid:2011), faktor yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah budaya kewargaan (*civic culture*). Bahkan, faktor ini merupakan sesuatu yang menjadi titik inti partisipasi politik masyarakat. Budaya kewargaan (*civic culture*) pada hakikatnya merupakan cermin dari tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokratis dalam masyarakat yang baik (*good citizen*). Sedangkan menurut Weimar (dalam Sastrodmojo, 1995), paling tidak ada lima faktor yang mempengaruhi partisipasi politik:

- a. *Satu*, modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa, dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara untuk turut serta dalam kekuasaan politik.
- b. *Dua*, terjadinya perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru yang pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- c. *Tiga*, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa, ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah partisipasi warga negara dalam kehidupan politik.

- d. *Empat*, adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini, seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.
- e. *Lima*, adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. Robert Lane (Dalam Rush dan Althoff, 2005) dalam studinya tentang keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu:

- a. *Satu*, sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi.
- b. *Dua*, sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
- c. *Tiga*, sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.

- d. *Empat*, sebagai sarana untuk memenuhi keutuhan alam bawah sadar dan keutuhan psikologis tertentu.

Sedangkan fungsi partisipasi politik bagi kepentingan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. *Satu*, untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.
- b. *Dua*, sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
- c. *Tiga*, sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

G. Definisi Operasional

Menurut Juliansyah Noor (2011:97) Definisi Operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variable agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep atau variable. Dimensi (indikator) dapat berupa perilaku, aspek, atau sifat karakteristik.

Mengukur dinamika sosial politik dalam kehidupan masyarakat . Salah satu cara menentukan indikator dalam mengukur dinamika politik masyarakat adalah dengan melihat partisipasi politik masyarakat tersebut, diantaranya melihat hasil keikutsertaannya dalam pemilihan umum,

pemilihan kepala daerah, atau pemilihan kepala desa. Dengan melihat partisipasi politiknya, maka akan diketahui seberapa besar peran masyarakat ikut serta dalam menentukan arah kebijakan, serta seberapa besar pemerintah memberi ruang bagi masyarakat untuk melibatkan diri. Dalam mengukur lingkup dinamika sosial, maka salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan melihat tingkat konflik dalam masyarakat tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam segitiga konflik Johan Galtung di atas, ada tiga aspek dalam konflik yaitu sifat, perilaku, dan kontradiksi. Sehingga, teori konflik merupakan salah satu cabang ilmu yang dapat dipakai dalam membaca dinamika sosial masyarakat, karena yang dipelajari adalah tentang sifat dan perilaku masyarakat beserta dinamika yang ditimbulkannya.

H. Metode Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang sistematis, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teori mengenai suatu cara/metode, atau cabang logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. (Juliansah Noor 2011 : 22).

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegunaan

dari metodologi yaitu untuk menentukan cara ilmiah yang didasar kepada ciri-ciri keilmuan agar suatu penelitian yang di teliti menjadi lebih Rasional, Empiris dan Sistematis.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dengan pertimbangan kehidupan masyarakat yang majemuk (terdiri dari tiga agama). Kondisi sosial dan politiknya menarik untuk diteliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam penelitian konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu.

Selanjutnya jenis kajian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan adalah tehnik analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan analisa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti ,dan dipelajari secara utuh.

Menurut Creswell (dalam Juliansah Noor 2011:34), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan

melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemadu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar terhadap landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Adapun dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu "teori".

3. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Suharsimi Arikunto, 2002:122).

Dalam penentuan informan di penelitian ini penulis menggunakan Purposive Sampling yaitu dengan cara sengaja karena alasan-alasan yang diketahui sifat dari sampel tersebut atau

menetapkan informan yang di anggap tahu dalam masalah yang sedang di teliti secara mendalam. Oleh sebab itu dalam penelitian ini informan yang ditentukan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Agama
1	Partomo	L	S1	Kepala Desa	Islam
2	Sajuto	L	SLTA	Sekretaris Desa	Islam
3	Dwi Priwulang	L	SLTA	Kaur	Islam
4	Bonari	L	SLTA	Petugas Gereja	Katolik
5	Sumul	L	SMP	Pedagang	Katolik

Sumber : Data Pribadi

4. Metode Pengumpulan Data

Data adalah suatu yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu terkait suatu masalah yang sedang di teliti sehingga akan dapat diperoleh keterangan terhadap permasalahan suatu hal sehingga dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu dengan jelas sesuai dengan kenyataan yang terjadi (Muhammad Idrus ,2009:99)

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan seainya (Suharsimi Arikunto: 2001).

b. Wawancara (Interview)

Menurut Juliansyah Noor (2011:138) wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara merupakan cara dalam pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara sistematif, aktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Demikian “Metode Deskripsi adalah suatu metode

dalam penelitian status kelompok manusia, obyek, suatu set kondisi social pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang”.

Alasan peneliti menggunakan Metode Deskripsi adalah :

- a. Pemaparan dalam metode deskriptif memungkinkan peneliti dapat menemukan dan memecahkan permasalahan yang ada.
- b. Pemaparan metode yang deskriptif dapat menjadikan pedoman bagi peneliti untuk menafsirkan data.
- c. Pelaksanaan metode tidak terbatas pada pengumpulan data sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasi data.

Begitu seluruh data yang diperoleh telah selesai dikumpulkan semuanya di analisis lebih lanjut secara intensif. Menurut Milles dan Huberman (1994), langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut :

- a. Penyusunan Data

Kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data sebelum melakukan analisa data, perlu dilihat alat ukur pengumpulan data antara lain dokumentasi dan wawancara atau gabungan keduanya.

b. Reduksi Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan penelitian dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

c. Penyajian Data

Peneliti menggambarkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah bentuk teks cerita atau naratif.

d. Analisa Data Kesimpulan

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.

Dari pengertian di atas dalam menganalisis data yang diperoleh setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah berikutnya penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju kearah kesimpulan.